

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER 02 TAHUN ANGGARAN 2022**

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022



Jln. Pemuda No. 29A, Kopta Bogor 16161

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, Januari 2023
Kepala Balai,

drh. Nasirudin , M.Sc.
NIP. 19650508 199003 1 001

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Ringkasan.....	6
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	8
II. Neraca.....	9
III. Laporan Operasional.....	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	12
A. Penjelasan Umum.....	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	19
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	20
B.2. Belanja	
B.3. Belanja Pegawai	
B.4. Belanja Barang	
B.5. Belanja Modal	
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1. Aset Lancar	
C.1.1. Piutang Bukan Pajak	
C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.1.3. Persediaan	
C.2. Aset Tetap	
C.2.1. Tanah	
C.2.2. Peralatan dan Mesin	
C.2.3. Gedung dan Bangunan	
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.3. Aset Lainnya	
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga	
C.5. Ekuitas	
C.5.1. Ekuitas	
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	
D.2. Beban Pegawai	
D.3. Beban Persediaan	
D.4. Beban Barang dan Jasa	
D.5. Beban Pemeliharaan	
D.6. Beban Perjalanan Dinas	
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	

- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, Januari 2023
Kepala Balai,

drh. Nasirudin , M.Sc.
NIP. 19650508 199003 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1,078,023,028 atau mencapai 121% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 888.000.000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp 23,779,355,231 atau mencapai 97% dari alokasi anggaran sebesar Rp 24,617,490,000

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 124.641.684.744,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 6,491,997,742 Aset Tetap (neto) sebesar Rp, 115,415,936,350 ; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 123.880.850.987,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1,039,926,525 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 31,836,805,680 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp -30,796,879,155. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp 38,096,503 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-30,758,782,652

.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp129.903.566.126,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp -30,758,782,652 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi

Antar Entitas sebesar Rp 22,701,332,203 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 121,818,115,677

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022			31 Desemberr 2021
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	888.000.000	1.078.023.028	121	847.065.660
Jumlah Pendapatan		888.000.000	1.078.023.028	121	847.065.660
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	4,044,226,000	4,034,809,745	100	4,008,477,551
Belanja Barang	B.4.	18,765,080,000	17,976,737,766	96	16,834,865,386
Belanja Modal	B.5.	1,808,184,000	1,767,807,720	98	6,757,729,188
Jumlah Belanja		24,617,490,000	24,617,490,000	97	27,601,072,125

II. NERACA**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
NERACA**

PER 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.3.	6.491.997.742	12.326.683.348
Jumlah Aset Lancar		6.491.997.742	12.326.683.348
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	80.183.520.000	80.183.520.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	48.281.102.902,	46.514.795.182
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	26.741.600.491	26.741.600.491
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.766.731.600	1.766.731.600
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	52.500.000	51.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	(41,609,518,643)	(37.636.967.932)
Jumlah Aset Tetap		115,415,936,350	117.620.679.341
Jumlah Aset		121,907,934,092	129.947.362.689
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	43.796.563,00	43.796.563,00
Utang yang belum ditagihkan	C.4.1.	46.021.852,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		89.818.415,00	43.796.563,00
Jumlah Kewajiban		89.818.415,00	43.796.563,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	121,818,115,677	129.903.566.126
Jumlah Ekuitas		121,818,115,677	129.903.566.126
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		121,907,934,092	129.947.362.689

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	1,039,926,525	845,447,967
JUMLAH PENDAPATAN		1,039,926,525	845,447,967
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	4,034,809,745	4,008,477,551
Beban Persediaan	D.3.	4,101,252,560	2,050,043,743
Beban Barang dan Jasa	D.4.	5,201,563,850	6,601,928,109
Beban Pemeliharaan	D.5.	3,477,646,406	1,625,923,192
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2,287,124,084	1,489,162,019
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		8,761,858,324	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	3,972,550,711	4,099,926,706
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	0	-6,873
JUMLAH BEBAN		31,836,805,680	19,875,454,447
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-30,796,879,155	-19,030,006,480
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	38,096,503,00	193,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.		
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		38,096,503,00	193,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-28,752,167,939,00	-19,030,006,287,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS AWAL	E.1.	129,903,566,126	123,101,555,925
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-28,752,167,939	-19,030,006,287
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-28,000,000	-921,989,977
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	22,701,332,203	26,754,006,465
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-6,078,835,736	6,802,010,201
EKUITAS AKHIR	E.6.	123,824,730,390	129,903,566,126

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani” (agar disesuaikan sesuai dengan kebijakan teknis yang ada di instansi masing-masing).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi	888.000.000,00	888.000.000,00
Jumlah Pendapatan	888.000.000,00	888.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,044,226,000,00	4,044,226,000,00
Belanja Barang Operasional	1,973,868,000,00	1,957,954,000,00
Belanja Barang Non Operasional	2,776,217,000,00	2,801,420,000,00
Belanja Barang Persediaan	3,741,945,000,00	3,663,100,000,00
Belanja Jasa	780,600,000,00	743,360,000,00
Belanja Pemeliharaan	1,365,047,000,00	3,309,279,000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,559,323,000,00	2,636,292,000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	4,130,000,000,00	3,574,830,000,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,806,540,000,00	1,808,184,000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jumlah Belanja	23,098,921,000,00	24,617,490,000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1,078,023,028 atau mencapai 121,4% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 888.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	9,550,000	0
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi	888.000.000,00	989,134,500,00	121,4
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0,00	2,200,000,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0,00	34,586,243,00	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	39,042,025,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain, Pengembalian Belanja Tahun Lalu	0,00	3,510,260,00	0,00
Jumlah	888.000.000,00	1,078,023,028,00	121.4

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami Kenaikan sebesar 121,4% dibandingkan TA 2021. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	.%
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi	989,134,500	575,460,500	0,71
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	3,510,260	0	0
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	34,586,243	0	0
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	39,042,025	550.899	69,86
Pendapatan Lain-Lain, Pengembalian Belanja Tahun Lalu	2,200,000	193	11397,96
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	9,550,000	0	0
Jumlah	1,078,023,028	576.011.592	11468,55

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp 24,617,490,000 atau 96,74% dari anggaran belanja sebesar Rp 23,779,355,231. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut: 24,617,490,000

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	4,044,226,000	4,034,809,745	99.77
Belanja Barang	18,765,080,000	18,011,447,877	95.98
Belanja Modal	1,806,540,000	1,767,807,720	97.77
Total Belanja Kotor	24,617,490,000	23,814,065,342	96.74
Pengembalian Belanja		34,710,111	0.00
Total Belanja	24,617,490,000	23,779,355,231	96.74

Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 96,74% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penambahan alat alat laboratorium
2. Penambahan bahanbahan untuk pengujian

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	.%
Belanja Pegawai	4.034.809.745	3.109.816.017	0,30
Belanja Barang	18.011.447.877	5.810.427.132	2,10
Belanja Modal	1.767.807.720	1.661.654.950	0,06
Total Belanja	23.814.065.342	10.581.898.099	2,46

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 4,034,809,745 dan Rp 3.110.176.077 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,30% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja Pegawai dikarenakan adanya penambahan pegawai, kenaikan tunjangan tertentu dan kenaikan pangkat dan penambahan tunjangan keluarga

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,034,809,745	3.110.176.077	0,30
Jumlah Belanja Kotor	4,034,809,745	3.110.176.077	0,30
Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	-360.060	0
Jumlah Belanja	4,034,809,745	3.109.816.017	0,30

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 14.409.602.766 dan Rp 5.810.427.132 Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 45,68% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja barang bertambah karena pembelian barang untuk penambahan pengujian dan pelanggan yang menguji pada satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,812,862,393	1.145.254.716	0,58
Belanja Barang Non Operasional	2,661,247,749	1.293.937.019	1,06
Belanja Barang Persediaan	3,723,534,493	1.152.353.828	2,23
Belanja Jasa	709,431,856	400.460.712	0,77
Belanja Pemeliharaan	3,226,585,651	1.129.621.784	1,86
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,310,650,735	688.799.073	2,35
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	14.444.312.877	5.810.427.132	8,85
Pengembalian Belanja Barang	34,710,111	0	-0,00
Jumlah Belanja	14.409.602.766	5.810.427.132	45,68

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar 1,767,807,720 dan Rp 1.661.654.950. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,06% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pembelian peralatan pengujian dan pendukung lainnya

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,767,807,720	1.661.654.950	0,06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1,767,807,720	1.661.654.950,00	0,06
Pengembalian Belanja Modal	0	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1,767,807,720	1.661.654.950,00	0,06

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1,767,807,720 dan Rp 1.661.654.950. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,06% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Penambahan Belanja Modal Peralatan Mesin adanya pembelian peralatan mesin untuk pengujian

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,767,807,720	1.661.654.950	0,06
Jumlah Belanja Kotor	1,767,807,720	1.661.654.950	0,06
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	1,767,807,720	1.661.654.950	0,06

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2021.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.341.870.248,00 dan Rp7.261.206.419,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	249,763,510	304.313.330,00
Bahan untuk Pemeliharaan	63,302,399	69.483.194,00
Suku Cadang	820,496,055	913.244.425,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
Bahan Baku	5,358,435,778	6.068.154.689,00
Jumlah	6,491,997,742	7.355.195.638,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 80.183.520.000,00 dan Rp 80.183.520.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1,767,807,720 dan Rp 40.086.936.994,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	40.086.936.994,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1,767,807,720
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
Saldo per 31 Desember 2022	1,767,807,720
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-37,529,544,645
Nilai Buku per 31 Desember 2022	48.060.612.982,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Jelaskan mutasi penambahan terdapat pembelian peralatan untuk pengujian berupa; ..alat pemeriksa Lactoscan, Soxlet, Sealer, Laptop, Printer seharga Rp. 1,767,807,720

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 26.411.729.491,00 dan Rp 26.411.729.491,00 Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	26.411.729.491,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	0,00
Saldo per 31 Desember 2022	26.741.600.491,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-3,577,175,522
Nilai Buku per 31 Desember 2022	26.741.600.491,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.765.782.600,00 dan Rp1.766.731.600,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp52.000.500,00 dan Rp51.000.000,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-41,609,518,643 dan Rp-36.685.001.084.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	48,281,102,902	-37.529.544.645	10,751,558,257
2.	Gedung dan Bangunan	26,741,600,491	-3.577.175.522	23,164,424,969
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,766,731,600	-453.922.672	1.312.808.928
4.	Aset Tetap Lainnya	52,500,000	-48.500.000	4,000,000
Akumulasi Penyusutan		76.841.934.993	-41.609.142.839	35.232.792.154

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 89.818.415 dan Rp 43.796.563. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Kepada Pihak Ketiga	43,796,563	43.796.563,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	46,021,852	0,00
Jumlah	89.818.415	43.796.563,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 121,818,115,677 dan Rp 129,903,566,126 Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 614.537.760,00 dan Rp 576.011.592,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	.%
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi	989,134,500	575,460,500	0,71
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	3,510,260	0	0
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	34,586,243	0	0
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	39,042,025	550.899	69,86
Pendapatan Lain-Lain, Pengembalian Belanja Tahun Lalu	2,200,000	193	11397,96
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	9,550,000	0	0
Jumlah	1,078,023,028	576.011.592	11468,55

Pendapatan terdapat penambahan dari tahun lalu dikarenakan adanya jumlah penambahan pada total pengujian

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 4.044.226.000,00 dan Rp 3.109.816.017,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,765,668,230	2.113.563.200,00	1,31
Beban Pembulatan Gaji PNS	5,204,626	31.501,00	165,22
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	164,134,468	128.110.980,00	1,28
Beban Tunj. Anak PNS	53,626,771	45.923.893,00	1,17
Beban Tunj. Struktural PNS	23,400,000	142.469.056,00	0,16
Beban Tunj. Fungsional PNS	405,535,000	308.530.000,00	1,31
Beban Tunj. PPh PNS	6,358,370	6.453.447,00	0,99
Beban Tunj. Beras PNS	147,302,280	24.300.000,00	6,06
Beban Uang Makan PNS	425,710,000	301.694.000,00	1,41
Beban Tunjangan Umum PNS	37,870,000	38.739.940,00	0,98
Jumlah	4,034,809,745	3.109.816.017,00	179,89

Penambahan nilai dikarenakan adanya kenaikan pangkat, kenaikan jabatan dan kenaikan gaji berkala serta penambahan CPNS yang baru.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 2.619.209.956,00 dan Rp 839.169.514,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	249,763,510	222.117.491,00	1,12
Beban persediaan lainnya	3,269,265,000	0,00	0,00
Jumlah	3.519.028.510	222.117.491	15,84

Penambahan beban persediaan terdapat kenaikan dibanding dengan tahun 2021 dikarenakan adanya kenaikan bahan untuk pengujian.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 5.530.685.000 dan Rp 2.793.524.490. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 30 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Bahan	723,780,000	31.740.478	22,80
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	186.892.722	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,927,517,000	1.075.303.819	1,79
Beban Barang Operasional Lainnya	165,850,000	43.059.225	3,85
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	212,220,000	130.362.000	1,63
Beban Honor Output Kegiatan	124,920,000	0	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	-
Beban Jasa Profesi	141,600,000	21.750.000	6,51
Beban Keperluan Perkantoran	1,304,986,000	841.212.490	1,55
Beban Langganan Air	60,000,000	19.772.500	3,03
Beban Langganan Listrik	540,000,000	306.785.508	1,76
Beban Langganan Telepon	24,000,000	4.724.747	5,08
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	277,210,000	125.573.501	2,21
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,602,000	5.047.500	2,69
Beban Sewa	15,000,000	1.300.000	11,54
Jumlah	5.530.685.000	2.793.524.490	94,75

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.365.047.000 dan Rp 1.348.816.879. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	549,480,000	532.772.244	96,96
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	409,230,000	246.821.444	60,31
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	406,337,000	350.028.096	86,14
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	22.749.579	0,00
Beban Persediaan suku cadang	0	196.445.516	0,00
Jumlah	1.365.047.000	1.348.816.879	3,85

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 2,559,323,000 dan Rp 688.799.073. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 30 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2,168,384,000	472.223.112	4,59
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	161.055.952	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,900,000	6.450.000	2,47
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,265,000	4.200.000	4,83
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	354,774,000	44.870.009	7,91
Jumlah	2,559,323,000	688.799.073	19,79

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 41.609.142.839 dan Rp 1.586.206.661,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 30 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	48.500.000,00	3.000.000,00	16,17
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,577,175,522	256.827.395,00	13,93
Beban Penyusutan Irigasi dan Jaringan	453.922.672	40.348.550,00	11,25
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	37,529,544,645	1.286.030.716,00	29,18
Jumlah	41.609.142.839	1.586.206.661,00	27,30

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-6.873,00 dan Rp-14.527,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	0,00	-6.873,00	-0,00
Jumlah	0,00	-6.873,00	-0,00

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	38,096,503	193,00	19,739,020.72
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	193,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0,00	0,00
Jumlah	38,096,503	193,00	19,739,020.72

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 129,903,566,126 dan Rp 123,101,555,925 kenaikan dari tahun sebelumnya Rp. 6,802,010,201

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp -30,758,782,652 dan Rp. -19,030,006,287. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 22,701,332,203 dan Rp 26,754,006,465. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2022
Ditagihkan ke Entitas Lain	22,701,332,203
Diterima dari Entitas Lain	-8,085,450,449
Jumlah	15.615.871.754

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 saldo DDEL adalah sebesar Rp-847.065.660,00 sedangkan DKEL sebesar Rp27.601.072.125,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 121,818,115,677 dan Rp 129,903,566,126.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Silahkan diberikan penjelasan mengenai kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Silahkan diberikan penjelasan mengenai hal-hal penting lainnya